

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan yang pertama penyebab masyarakat Tanjung Jabung Timur tetap menggunakan hak pilihnya secara optimal disaat kurangnya infrastruktur yang memadai karena adanya intervensi birokrasi terhadap aparatur pemerintahan dan kuatnya kepentingan politik. Intervensi pejabat politik terhadap mutasi pejabat struktural membawa pengaruh negatif terhadap tatanan birokrasi. Hal ini disebabkan karena pejabat politik berusaha untuk memasukkan massa atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan yang sama ke dalam tubuh birokrasi dalam upaya memperkuat posisi tawar pejabat politik. Serta kuatnya kepentingan politik dimana hal ini menjadi salah satu penyebab lemahnya kompetensi birokrasi di Indonesia. Sehingga optimalisasi pola kepemimpinan yang berkarakter kuat, tegas, serta bertanggung jawab merupakan variabel yang menentukan dalam upaya pengembalian fungsi birokrasi

Faktor yang paling berpengaruh dalam politisasi birokrasi yang terjadi di Tanjung Jabung Timur disebabkan oleh keinginan untuk memperkuat kekuasaan politik. Kekuasaan ini digunakan untuk menyusun, menjaga, dan memperkuat pasukan atau jajarannya yang ada di bawahnya agar pemerintahan dapat berjalan seperti yang dikehendakinya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan posisinya agar tidak terganggu. Dalam konteks politik, hal tersebut dapat dikatakan wajar apabila kekuasaan yang dijalankannya tidak melampaui dari kepentingan pemerintahan, serta adanya politik balas budi yang menjadi motivasi elite birokrasi mendukung pemilihan umum, dimana elite birokrasi yang telah diangkat sebagai pimpinan merasa bertanggung jawab dan membalas kebaikan yang dilakukan petahana karena

telah memberikan jabatan. Dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran yang pertama, pejabat politik diharapkan untuk mampu meminimalisir berbagai kepentingan dan campur tangan berlebih dari berbagai kepentingan individu/kelompok tertentu dalam urusan-urusan birokrasi pemerintah daerah terutama dalam hal manajemen kepegawaian. Serta pemerintah harusnya berpedoman kepada Undang-undang dan aturan yang berlaku dalam proses reformasi birokrasi dengan mengeyampingkan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat.